

## INTISARI

Organisasi pemerintahan melakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan selama tahun anggaran. Pengukuran kinerja organisasi pemerintahan didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan kinerja organisasi terukur pada capaian target atas program/kegiatan tanpa memperhatikan indikator kinerja yang disusun telah tepat sasaran atau belum.

Penelitian ini melakukan evaluasi atas indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua, berupa Rencana Strategis Tahun 2013—2018 dan Rencana Kerja Tahunan tahun 2013, 2014, dan 2015. Alat analisis yang digunakan adalah model logika dan analisis empat kuadran Friedman (model cetak biru kinerja). Tujuan penelitian adalah mengetahui indikator kinerja Dispenda Papua, berorientasi pada upaya atau hasil.

Hasil atas penelitian ini ditemukan bahwa indikator kinerja dalam dokumen perencanaan Dispenda Papua memiliki keselarasan informasi. Dari analisis empat kuadran Friedman diketahui bahwa indikator kinerja Renstra Dispenda Papua tahun 2013—2018 berorientasi pada aspek penyediaan layanan atau berfokus pada hasil. Dokumen RKT Dispenda Papua juga menunjukkan indikator kinerja lebih berfokus pada hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan dengan persentase 84%. Hal ini menunjukkan indikator kinerja yang tersusun dalam dokumen perencanaan didominasi oleh jumlah pelayanan kepada masyarakat, bukan kualitas atau manfaat yang diterima masyarakat atas pelayanan tersebut.

**Kata kunci:** Pengukuran Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Indikator Kinerja, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Model Logika, Empat Kuadran Friedman

## ABSTRACT

*Government organizations measure performance to assess the success and failure of a program/activity implementation during the fiscal year. Measuring the performance of government organizations is supported by Presidential Instruction No. 7/1999 on Performance Accountability Government agencies aim to achieve good governance. The success of a measured organizational performance on the target achievement of the program/activity is determined regardless whether the performance indicators that have been prepared is achieved or not.*

*This study evaluates the performance indicators contained in the planning documents of the Papua Province Revenue Service in the form of the Strategic Plan of 2013-2018 and the Annual Work Plans of 2013, 2014 and 2015. The analysis tools used are the logic model and Friedman's four quadrants analysis called model performance blueprint. The purpose of this research is to determine whether the performance indicators of Dispenda Papua are oriented to efforts or results.*

*The results of this study show that the performance indicators in Dispenda Papua planning documents have information alignment. Friedman's four quadrants analysis reveal that the performance indicators in the Renstra Dispenda Papua 2013-2018 are oriented towards the service delivery aspect, or they focus on results. The Dispenda Papua RKT document also shows that performance indicators are still focused on the results obtained from the implementation of programs / activities with the percentage of 84%. This indicates that the performance indicators composed in the planning document are dominated by the amount of service to the community, not the quality or benefits received by the community for the service.*

**Keywords:** Performance Measurement, Performance Accountability of Government Agencies, Performance Indicators, Strategic Plans, Annual Work Plans, Logic Models, Four Friedman Quadrants.